

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Peraturan tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa Daerah memiliki kewenangan berupa Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemberian peraturan otonomi kepada Daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memantau penggunaan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, dalam proses pembangunan banyak permasalahan yang muncul seperti masalah anggaran, maka untuk mengatasi hal tersebut bisa di lakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan dana yang tersedia sehingga pembangunan bisa di lakukan dengan merata.

Dalam rangka pembangunan daerah yang di lakukan oleh pemerintah daerah di perlukan adanya sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, dan strategis. .Dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan salah

satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai Pelaksanaan Daerah. Selain pajak daerah yang harus di kembangkan potensinya dalam penerimaan pendapatan daerah yaitu retribusi daerah. Oleh karena itu penerimaan retribusi daerah harus di kelola dengan benar.

Dalam hal ini pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Selain pajak daerah pendapatan retribusi daerah juga sangat dibutuhkan karena semakin tinggi pendapatan retribusi akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Salah satu jenis retribusi daerah yaitu retribusi perizinan tertentu.

Retribusi prizinan tertentu di bagi menjadi 3 (tiga) :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Gangguan
- 3) Retribusi Izin Trayek

Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di atur dalam peraturan daerah Banjarnegara nomor 6 tahun 2011. Subjek dari retribusi IMB yaitu orang pribadi atau badan, sedangkan untuk pemungutan retribusi IMB di lakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara. Di dalam peraturan tersebut di jelaskan pula proses permohonan izin sampai dengan pembayaran retribusi IMB.

Meskipun proses penerbitan SK IMB cukup mudah akan tetapi kesadaran masyarakat akan kegunaan IMB dan kesadaran dalam membayar retribusi IMB masih kurang. Kebanyakan masyarakat masih menganggap prosedur dalam pengajuan IMB terkesan sulit sehingga enggan untuk

mengurus perizinan tersebut. Hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan retribusi IMB.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan menjelaskan bagaimana prosedur perizinan dan pendapatan retribusi atas izin mendirikan bangunan. Dengan demikian penulis akan menulis Tugas Akhir dengan mengambil judul **“PROSEDUR PERIZINAN DAN PENDAPATAN RETRIBUSI ATAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA DISNAKER PMPTSP KABUPATEN BANJARNEGARA”**.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada laporan Tugas Akhir ini yaitu :

- a. Bagaimana Prosedur Perizinan Retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan pada Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara?
- b. Bagaimana Prosedur Pelaporan Pendapatan atas Izin Mendirikan Bangunan pada Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara?

### **1.3. Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

#### **1. Maksud Praktik Kerja Lapangan**

- a. Untuk memahami dan mengetahui secara langsung prosedur perizinan dan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan.
- b. Mengamati dan mempelajari dari Bidang Pekerjaan tertentu pada tempat PKL.
- c. Mencari pegetahuan serta pengalaman dalam bekerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

## 2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, adapun tujuan dari penulisan laporan ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui prosedur perizinan retribusi atas izin mendirikan bangunan pada Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara?
- b. Untuk mengetahui prosedur pelaporan pendapatan atas izin mendirikan bangunan pada Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara?

## 3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Mahasiswa

- a. Menambah pengetahuan mahasiswa tentang Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dengan praktek sehingga dapat mengetahui seberapa jauh teori yang di peroleh selama mengikuti perkuliahan.
- c. Menjadikan sarana latihan kerja dan melatih diri agar tanggap dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda.

### 2. Bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto

- a. Sebagai sarana pembelajaran dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam menghadapi dunia kerja.

- b. Terciptanya hubungan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.
  - c. Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan instansi dalam meningkatkan kreatifitas pribadi.
3. Bagi Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaen Banjarnegara
- a. Diharapkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberi kesempatan antara Lembaga Pendidikan dan Instansi terkait untuk kerjasama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis
  - b. Sebagai sarana pendidikan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang merupakan calon tenaga kerja di Indonesia.
  - c. Instansi tersebut dapat menilai tenaga kerja yang potensial di kalangan mahasiswa sehingga apabila suatu saat membutuhkan karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut.

#### **1.4. Pembatasan Masalah**

Pada penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas. Penulisan ini di batasi hanya pada Prosedur dan Pendapatan Retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.

## 1.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di peroleh pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

### 1. Data Premier

#### a. Metode Observasi

Pengumpulan data pada metode Observasi bisa di lakukan dengan cara mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mencatat informasi dan mendapatkan data yang di butuhkan.

#### b. Metode Wawancara

Pengumpulan data pada metode wawancara bisa di lakukan dengan cara melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait sesuai dengan objek penelitian sehingga dapat memperkuat hasil observasi yang telah di lakukan.

### 2. Data Sekunder

#### a. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data pada metode dokumentasi di lakukan dengan cara pencatatan dan penginputan dokumen yang berkaitan dengan perizinan dan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan.

#### b. Metode Studi Pustaka

Pengumpulan data pada metode studi pustaka dapat di lakukan dengan cara mengumpulkan data secara teoritis serta bacaan

lainnya sebagai bahan acuan dalam penulisan laporan Tugas Akhir yang berhubungan dengan judul tersebut.

### 1.6. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

#### a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan awal yang harus di lakukan untuk:

- 1) Mengurus Perizinan pada tempat PKL.
- 2) Mengajukan usulan ke tempat PKL.
- 3) Mengurus perizinan kepada pihak Fakultas untuk melaksanakan PKL.
- 4) Melaksanakan PKL sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.

#### b. Tahap Pelaksanaan

Tempat Kerja Praktik : Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Banjarnegara

Waktu Pelaksanaan : 01 Februari – 18 Maret 2021

Setiap hari Senin – Jum'at, mulai pukul  
08.00 – 16.00 WIB

#### c. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap penyusunan laporan dapat di lakukan apabila semua data dan informasi yang di butuhkan sudah lengkap.

Berikut merupakan tahapan penyusunan laporan :

- 1) Mengajukan Judul Tugas Akhir
- 2) Menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk melaporkan hasil Praktik Kerja Lapangan
- 3) Menyusun laporan PKL mulai dari bagian awal hingga daftar pustaka
- 4) Melaporkan hasil PKL kepada Pembimbing

